

DAFTAR RUJUKAN

Buku :

- Adiwijaya, S., dkk. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Jambi : PT Sonpedia Publishing Indonesia
- Amirudin & Asikin, Z. (2023). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Kota Depok
- Arba, M. (2021). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- BPS Kabupaten Buleleng. (2025). *Statistik Daerah Kabupaten Buleleng 2025*. Buleleng : BPS Kabupaten Buleleng.
- Equatora, M. A., & Awi, L. M. (2021). *Teknik pengumpulan data klien*. Bitread Publishing.
- Hajati, S., dkk. (2020). *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya : Airlangga University Press
- Hasan, H., dkk. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat : Yayasan Tri Edukasi Ilmiah
- Kurniati, N. (2016). *Hukum Agraria Sengketa Pertanahan Penyelesaian Melalui Arbitrase dalam Teori dan Praktik*. Bandung : PT Refika Aditama
- Majid, A. (2017). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan : Penerbit Aksara Timur.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta
- Ramadhani, R. (2022). *Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya*. Medan : Umsu Press
- Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Surabaya : Cipta Media Nusantara.
- Rifa'i, I. J. (2023). *Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. Metodologi Penelitian Hukum, 6*. Banten : PT Sada Kurnia Pustaka
- Sahir, S.H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta : Penerbit KBM Indonesia
- Sahnan.(2016). *Hukum Agraria Indonesia*. Malang : Setara Press
- Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. Daerah Istimewa Yogyakarta : Pt Kanisius.
- Setiawan, I. K. O (2023). *Hukum Agraria*. Bandung Jawa Barat : Reka Cipta
- Sihombing, B. F. (2019). *Sistem Hukum PPAT dalam Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta : Kencana

- Sugiharto, U. S., dkk. (2015). *Hukum Pengadaan Tanah Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi*. Malang : Setara Press
- Supriadi, S. H. (2023). *Hukum agraria*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Susanti, I.L.E. (2024). *Hukum Agraria*. Kota Batu : CV Beta Aksara
- Sutedi, A. (2023). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta:Sinar Grafika
- Sutedi, A. (2023). *Sertifikat hak atas tanah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Santoso,U.(2019). *Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah*. Jakarta Timur : Prenada Media.
- Waskito, M.,dkk. (2019). *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: sebuah tinjauan teori & praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Artikel dalam Jurnal :

- Arnowo, H. (2019). Pola Pemberdayaan Masyarakat Pasca Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) The Pattern Of Community Empowerment After Complete Systematic Land Registry (PTSL).
- Abon, M. A., dkk. (2022). Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 64-80.
- Apriani, D., & Bur, A. (2021). Kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam sistem publikasi pendaftaran tanah di indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 220-239.
- Asiri, L. (2020). Pelaksanaan Mitigasi Bencana Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton. *Kybernan: Jurnal Studi Pemerintahan*, 3(2), 28-40.
- Alimuddin, N. H. (2021). Implementasi sertifikat elektronik sebagai jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. *Sasi*, 27(3), 335-345.

- Avivah, L. N., dkk. (2022). Pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan sertifikat tanah. *Tunas Agraria*, 5(3), 197-210.
- Andari, D. W. T., & Mujiburohman, D. A. (2023). Aspek Hukum Layanan Sertifikat Tanah Elektronik. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 15(1), 154-170.
- Aziza, A. Z., Efendi, A., & Soetijono, I. R. (2024). Kepastian Hukum Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Karena Jual Beli Dengan Syarat Sebagai Peserta Aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 6(1), 19-28.
- Bekak, R. Y. T., dkk. (2023). Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Kaitannya Dengan Pendaftaran Tanah (Studi Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Kupang). *Artemis Law Journal*, 1(1), 49-58.
- Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. (2021). Kekuatan Hukum Akta Jual Beli yang Dibuat Oleh Camat dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan PPAT. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 905-916.
- Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. (2021). Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 486-494.
- Dantes, K. F., dkk. (2024). Kebijakan Pemerintah dalam Pemberian Bentuk Ganti Kerugian pada Pengadaan Tanah Berskala Kecil Berbasis Keadilan di Kabupaten Buleleng. In *Seminar Nasional Riset Inovatif* (Vol. 9).
- Esdarwati, S. (2021). Pentingnya kepastian hukum dalam pendaftaran tanah sistematik lengkap (PTSL) untuk masyarakat. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 2(01), 41-50.
- Fathurrahman, M. (2018). Pentingnya arsip sebagai sumber informasi. *JUPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi)*, 3(2), 215-225.
- Hasanah, A. J. (2022). Akibat Hukum Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(9), 730-738.

- Herman, M. A., dkk. (2023). Optimalisasi Pendaftaran Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Perspektif Maqasyid Al-Syariah. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syasah Syar'iyah*, 4(3), 272-283.
- Hidayah, S., dkk. (2024). Tantangan dan Peluang Sertifikat Elektronik dalam Reformasi Pendaftaran Tanah di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(6), 186-199.
- Hulu, K. I. (2021). Kekuatan alat bukti sertifikat hak milik atas tanah dalam bukti kepemilikan hak. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 27-31.
- Hutasoit, L. N., & Habeahan, D. B. (2025). Tinjauan Hukum Penerbitan Sertipikat Tanah Secara Elektronik Pada Badan Pertanahan Nasional. *Transparansi Hukum*, 8(1), 125-137
- Kaunang, M. C. (2016). Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. *Lex Crimen*, 5(4).
- Kusuma, D. A., dkk. (2017). Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Hak Yang Kuat. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(2), 309-321.
- Maulidiyah, R. F. (2019). Penerapan peraturan menteri agraria mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl). *Dinamika*, 25(1).
- Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 1(3), 252-262.
- Monalu, T. J. (2023). Kedudukan Yuridis Penerbitan Sertifikat Tanah Ke Sistem Elektronik Sebagai Jaminan Keamanan. *Lex Privatum*, 11(2).
- Nurasa, A., & Mujiburohman, D. A. (2020). Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah.
- Oe, M. D. (2015). Tugas dan fungsi badan pertanahan nasional dalam pendaftaran tanah. *Pranata Hukum*, 10(1), 26777.
- Pageh, I. M., & Pardi, I. W. (2022). Buleleng Kelabu: Sejarah Tragedi Amuk Massa Di Bali Utara. *Candra Sangkala*, 4(1), 21-31.

- Rizaldi, M., dkk. (2023). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Tanah Antara Hak Guna Usaha dan Hak Milik. *Widya Bhumi*, 3(2), 137-151.
- Sudarmawan, G. A., & Surata, I. G. (2017). Kekuatan Hukum Sertipikat Pengganti Karena Hilang di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, 5(2).
- Syamsur, S., dkk. (2023). Analisis hambatan pemberlakuan sertifikat elektronik serta upaya penyelesaiannya di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1), 97-105.
- Syarif, M. BAB 1 Karakteristik Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum. *Metode Metode Penelitian Penelitian Hukum Hukum*, 1.
- Prawira, N. G. A. (2021). Kriteria Penentuan Kawasan Evakuasi Bencana Non-Alam dan Bencana Sosial sebagai Upaya Mitigasi. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 2(2), 137.
- Yamin, M., & Zaidar, Z. (2018). Pendaftaran Tanah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Tanah Dan Upaya Meminimalisir Konflik Pertanahan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2), 201-210.
- Yani, A., & Syafiin, R. A. (2021). Pengarsipan elektronik sertifikat tanah untuk menjamin ketersediaan arsip sebagai alat bukti yang sah pada sengketa pertanahan. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 14(1), 57-73.
- Yasmiati, N. L. W. (2022). Implementasi Dan Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom Of Contract) Dalam Melakukan Perjanjian Di Dalam Masyarakat Untuk Menjamin Adanya Keseimbangan Dan Kepastian Hukum. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 3(1), 42-49.
- Yusrizal, M. (2017). Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 113-138.

Artikel Elektronik :

- Azhwil Yuliyana Kayadoe. (2016). Peralihan Hak Atas Tanah Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. *Lex Privatum*, 4(6), 146535. <https://media.neliti.com/media/publications/146535-ID-none.pdf>
- bpnbuleleng. (2025). *Kantah Kab. Buleleng*. Bpnbuleleng.id. <https://bpnbuleleng.id/> diakses pada 13 januari 2025
- Lumban, V. (2024, Agustus 2). *Syarat Balik Nama Sertifikat Tanah karena PewarisanKlinikHukumonline*.Hukumonline.com.<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-balik-nama-sertifikat-tanah-karenapewarisanlt594688c8e533e/> Diakses pada 11 Desember 2024
- Pendahuluan, B., Latar, A., & Masalah, B. (n.d.). <http://scholar.unand.ac.id/120229/2/PENDAHULUAN.pdf> Diakses pada 5 September 2024
- Pengertian dan Proses Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)*. (2024). Bsdcity.com. <https://www.bsdcity.com/news-events/pengertian-dan-proses-akta-pembagian-hak-bersama-aphb/>
- Pemecahan, Pemisahan, dan Penggabungan Bidang Tanah | Hukum Properti By Leks&Co.*(2023).Hukumproperti.com.<https://hukumproperti.com/pemecahan-pemisahan-dan-penggabungan-bidang-tanah/> Diakses pada 16 Maret 2025
- Sovia Hasanah, S.H. (2017, Mei 8). *Pendaftaran Tanah Secara Massal | Klinik Hukumonline*.Hukumonline.com.<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendaftaran-tanah-secara-massal-lt5902cfc843d40/> diakses pada 17 Februari 2025
- Tampubolon, B. (2019, Mei 14). *Prosedur Pembebanan Hak Tanggungan Hak Atas Tanah - Konsultan Hukum Professional*. Konsultan Hukum Professional. <https://www.konsultanhukum.web.id/prosedur-pembebanan-hak-tanggungan-hak-atas-tanah/> Diakses pada 10 Desember 2024
- p, sandy. (2024, September 6). *Peralihan Hak Atas Tanah dalam Hukum Properti Indonesia*. SIP Law Firm. <https://siplawfirm.id/hak-atas-tanah/?lang=id> Diakses pada 5 Januari 2025

Skripsi :

Gustaman, Fajar Kemal.2014. Pemulihan Data Pendaftaran Tanah Pasca Bencana Kebakaran Di Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur. Skripsi. Program Diploma IV Pertanahan Jurusan Perpetaan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

Saputro, Budi.2017. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Yang Arsipnya Musnah Terbakar Pasca Kebakaran Gedung Arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur. Tesis.Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pasundan, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723)

Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Nomor 3696)

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 501).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penanganan Bencana Dan Pengembalian Hak – Hak Masyarakat Atas Aset Tanah Di Wilayah Bencana

Putusan Pengadilan :

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 18/G/2020/PTUN.DPS.

